

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga. Artinya Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang menitik beratkan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan terhadap warga negara Indonesia. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.² Salah satu hasil dalam pelaksanaan hukum yang mencerminkan kepastian hukum adalah dengan adanya sebuah alat bukti dalam setiap kegiatan hukum.

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang

¹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 1.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 1.

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.³

Pembuktian terhadap alat bukti untuk menjamin kepastian hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis. Keberadaan alat bukti tertulis dapat berupa akta autentik atau pun akta dibawah tangan tersebut nantinya akan menentukan secara sah mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjadi tolak ukur dalam hal kepastian hukum, dan selain itu akta tersebut diharapkan dapat meminimalisir sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum.

Perbedaan pokok antara akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)). Cara pembuatan atau terjadinya Akta di bawah tangan tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja hal tersebut sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara.

Sesuai dengan permintaan masyarakat terhadap perlunya kepastian hukum atas penting nya suatu akta autentik, maka terbentuklah suatu jabatan yang menangani hal tersebut yang disebut Notaris. Jabatan Notaris lahir karena kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan

³ *Ibid*, hlm, 7.

melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴ Notaris adalah satu- satunya pejabat yang diberi wewenang perihal pembuatan akta tertentu. Dalam hal ini Notaris di Indonesia memiliki perjalanan yang bermula pada abad ke 17 dengan beradanya “*Osst Ind Compagnie*” di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, sekretaris “*Collage Van Schepene*”.⁵ Dengan diangkat nya Notaris pertama tersebut, kebutuhan akan Notaris di Indonesia semakin berkembang dengan pesat di daerah kota besar.

Peraturan tentang Notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan *Reglement op Het Ambt in Indonesie* (Staatblad 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan aturan peninggalan zaman kolonial Hindia belanda dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Notaris. Berbagai ketentuan dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukannya pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.⁶

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.

⁵ <https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-Notaris/>. Akses internet tanggal 15 September 2017.

⁶ Yanti Jacline Jennifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan Kode Etik Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 1.

diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004 dan sebagaimana ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal. Landasan filosofis lahirnya UUNJ adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁷

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergerakan dinamis termasuk dalam Peraturan Jabatan Notaris. Seiring dengan semakin banyak nya kebutuhan masyarakat terhadap Notaris ini sendiri, menyebabkan timbul nya permasalahan baru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada Tahun 2014, DPR beserta Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang baru yang mengatur perihal kebutuhan Masyarakat dan Notaris itu sendiri yang belum di atur dalam UUNJ. UUNJ akhir nya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ-P). Perubahan dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut hendaknya dapat menjadi acuan baru bagi Notaris dalam menjalankan Jabatannya. Perubahan signifikan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu dihapus nya pengaturan tentang Notaris Pengganti Khusus, yang dalam Undang-Undang 30

⁷ H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

Tahun 2004 berfungsi sebagai membuat akta tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena hanya ada seorang Notaris di satu kabupaten tersebut, sedangkan dalam UUJN-P mengatur bahwa Notaris tidak dapat membuat akta yang dimaksud dalam surat penetapan tersebut. Sehingga menurut UUJN-P, Notaris tidak dapat membuat akta tertentu untuk dirinya sendiri dengan alasan hanya satu Notaris dalam wilayah jabatannya tersebut.

Selain perubahan tersebut, UUJN-P memiliki perubahan peraturan terhadap Pejabat Sementara Notaris, yang dimana pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Namun dalam UUJN-P, peraturan terhadap Pejabat Sementara Notaris berubah menjadi seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

UUJN-P mempersempit peraturan untuk Jabatan Sementara Notaris, dari Pejabat Sementara Notaris yang dapat menggantikan sementara Jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, dan diberhentikan sementara menjadi Pejabat Sementara Notaris yang hanya dapat menggantikan Jabatan Notaris yang meninggal dunia. Peraturan tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dan pada Pasal 35 ayat (4) menyatakan Pejabat Sementara Notaris

menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dan pada Pasal 35 ayat (5) menyatakan Notaris dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁸

Peraturan tentang Pejabat Sementara Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Permenkumham nomor 25 Tahun 2014). Pasal 39 ayat (1) menjelaskan Notaris berhenti dikarenakan meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya, ahli waris wajib memberitahukan secara manual atau elektrik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Pasal 40 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ahli waris atau karyawan Notaris mengusulkan Pejabat Sementara Notaris, MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Notaris tersebut meninggal dunia. Pasal 42 ayat (4) ahli waris atau karyawan tidak mengusulkan, MPD harus menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu pemberitahuan Notaris meninggal dunia terlampaui.

Ahli waris dalam Pasal 822 KUHPer menjelaskan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang

⁸ Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, Eresco, Bandung, 2007, hlm. 12.

meninggal. Dari penjelasan Pasal dalam KUHPer tersebut, Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Namun pada ahli waris seorang Notaris yang telah meninggal dunia, ahli waris tidak hanya memiliki hak untuk menerima harta peninggalan, namun memiliki kewajiban untuk melaporkan kematian Notaris serta mengusulkan Pejabat Sementara Notaris untuk menjabat sementara posisi Notaris yang telah meninggal tersebut.

Prosedur Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁹. Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian Salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta telah ditandatangani oleh Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan kepastian hukum akan pemberian salinan akta tersebut nantinya. Dalam praktiknya, tidak semua pelaksanaan protokol penggantian Notaris yang meninggal dunia ke Pejabat sementara Notaris dilaksanakan dengan baik dan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dimana prosedur

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.159.

penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada MPD wajib dilakukan, namun dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan siapakah yang bertanggung jawab untuk mengurus protokol yang telah ditinggalkan oleh Notaris tersebut.

Contoh kasus dapat di lihat, dalam wawancara oleh salah satu MPD kota Padang, Bapak Dasman S.H, M.Kn dimana, salah satu Notaris “x” di Kota Padang, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, dan sampai pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 belum ada pengurusan terhadap pengalihan protokol dari Notaris yang meninggal dunia oleh MPD ke Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk.¹⁰ Pasal 39 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 tahun 2014 menjelaskan Notaris berhenti dikarenakan meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya, ahli waris wajib memberitahukan secara manual atau elektrik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Serta dalam hal ini, tanggung jawab pengurusan protokol Notaris yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia tersebut dilakukan oleh karyawan Notaris yang bersangkutan. Dikarenakan tidak diaturnya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap protokol Notaris serta pemberitahuan Notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris dan bagaimana prosedur pengalihan protokol Notaris kepada Pejabat Sementara Notaris oleh MPD maka terhadap permasalahan ini penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimanakah tanggung jawab ahli waris dan karyawan Notaris yang meninggal dunia terhadap protokol notaris dan penulis tertarik untuk membuat tesis

¹⁰ Wawancara dengan Narasumber, pada tanggal 17 Maret 2018.

dengan judul **“TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA ATAS PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana prosedur peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Pejabat Sementara Notaris di Kota Padang?
2. Bagaimana peran ahli waris serta karyawan Notaris yang meninggal dunia terhadap protokol Notaris di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Pejabat Sementara Notaris di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran ahli waris serta karyawan Notaris yang meninggal dunia terhadap protokol Notaris di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pengaturan dan pelaksanaan Pejabat Sementara Notaris serta bagaimana tanggung jawab ahli waris Notaris yang meninggal dunia di Sumatera Barat khususnya Kota Padang.

b. Manfaat Praktis

1. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.
2. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam pelaksanaan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas penulis melakukan adanya penelitian di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Andalas menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Protokol Notaris” belum ada yang membahasnya.

Namun penulis menemukan tesis karya mahasiswa yang terkait dengan judul penulis yaitu:

1. Ahmad Rendi Saputra, 2016, mahasiswa program studi Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang. Dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Sementara Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Bermasalah Yang Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBL.)”.

Pembahasan tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia atas akta bermasalah yang batal demi hukum?
- b. Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 22/Pdt./2012/PT.Jbi terhadap Pejabat Sementara Notaris telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum?

Pada tesis yang telah dibuat oleh Rendi Saputra tersebut, membahas tentang pertanggungjawaban hukum Pejabat Sementara Notaris terhadap sebuah akta bermasalah yang batal demi hukum, dalam rumusan masalah yang diangkat oleh Rendi tersebut, menitik- beratkan kepada tanggung jawab Pejabat Sementara Notaris kepada sebuah akta yang batal demi hukum dikarenakan akta tersebut bermasalah. Sedangkan pada tesis yang penulis angkat adalah tentang akibat hukum yang akan terjadi apabila tidak di angkatnya Pejabat Sementara Notaris terhadap Notaris yang meninggal dunia. Dimana masalah yang diangkat oleh penulis adalah proses pengangkatan dan akibat hukum apabila tidak diangkatnya Penjabat Sementara Notaris tersebut apabila Notaris telah Meninggal dunia.

2. Dedy Arianto, 2010, mahasiswa pada program studi Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya. Dengan judul “Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris”.

Pembahasan tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penjelasan sistematis mengenai karakteristik Pejabat Sementara Notaris?
- b. Bagaimana analisa akibat hukum yang dibuat oleh Pejabat Sementara Notaris dalam menjalankan jabatannya dibandingkan dengan Pejabat Notaris?

Dalam hal tesis yang dibuat oleh Dedy Arianto, pembahasan masalah yang diangkat adalah tentang karakter dari seorang Pejabat Sementara Notaris dalam menjalankan jabatannya serta perbandingan antara Pejabat Sementara Notaris dengan Pejabat Notaris tersebut. Penulis mendapatkan perbedaan dalam hal masalah yang diangkat dalam tesis tersebut, dikarenakan yang menjadi masalah adalah akibat hukum dalam menjalankan jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris, sedangkan penulis membahas tentang proses pengangkatan dan peran ahli waris dalam perpindahan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Pejabat Sementara Notaris serta bagaimana akibat hukum apabila tidak diangkatnya Pejabat Sementara Notaris.



F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹¹ Pada dasarnya kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau pendapat, dimana teori tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis itu sendiri. Hans Kelsen dalam buku Soerjono Soekanto menjelaskan tentang teori “*Reine Rechtslehre*” atau “*The Pure Theory of Law*”. Teori Kelsen merupakan “*normwissenschaft*”, dan hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum.¹²

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan seperti mempertajam dan mengkhususkan fakta yang hendak di teliti atau di uji kebenarannya, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta mengembangkan beberapa definisi, dan kemungkinan dari beberapa prediksi menjadikan suatu prediksi fakta mendatang dikarenakan telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang.¹³ Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan teori Kewenangan dan teori Pertanggungjawaban Hukum.

a. Teori Kewenangan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 14.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 127.

¹³ *Ibid*, hlm 121.

Kewenangan berasal dari Undang-Undang yang sering disebut dengan kekuasaan formal, dan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan itu sendiri. Philipus M. Hadjon dalam buku Ridwan HR mengemukakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang tersebut terbagi tiga cara yaitu:

1. Kewenangan atribusi, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.¹⁴
2. Kewenangan delegasi, yang dimaksud dari kewenangan delegasi adalah terjadinya suatu pelimpahan pada suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.¹⁵
3. Mandat, mandat lebih kepada tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang dari badan yang satu kepada badan yang lain. Dan untuk tanggung jawab sendiri, kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberian mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.¹⁶

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 104.

¹⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 91.

¹⁶ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm 104.

Jenis dan cara pemberian wewenang tersebut bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukumnya, dan komponen konfirmabilitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Wewenang tersebut merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tulisan ini, konsep wewenang lebih tertuju kepada wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam menentukan Pengalihan Protokol Notaris yang meninggal dunia dan wewenang Pejabat Sementara Notaris dalam menggantikan Notaris yang meninggal tersebut. Dimana kewenangan Notaris sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang didapatkan secara atribusi, dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Pejabat Notaris nantinya akan menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang dan tanpa perlu memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat dan Notaris wajib melaksanakan kewenangan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷ Dalam istilah hukum tanggung jawab dibagi atas beberapa istilah. Istilah *liability* adalah pertanggungjawaban yang dimana tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan istilah *responsibility* adalah merujuk kepada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Hans Kelsen mengemukakan bahwa tanggung jawab dibagi atas beberapa bagian yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi, 2007, hlm. 81

¹⁸ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm hlm. 337.

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, tanggung jawab nantinya akan dibebankan kepada pejabat yang dimana telah memiliki kewenangan. Dalam hal ini, dengan adanya suatu kewenangan inilah memunculkan suatu pertanggungjawaban dalam suatu jabatan.¹⁹

Teori pertanggungjawaban hukum dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran serta tanggung jawab seorang ahli waris Notaris yang meninggal dunia dalam hal peralihan protokol Notaris kepada Pejabat Sementara Notaris dan bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap pengunjukkan dan pengangkatan Pejabat Sementara Notaris tersebut. Dengan adanya teori ini nantinya akan menjawab tanggung jawab tersebut akan dibebankan kepada ahli waris Notaris atau hanya kepada Majelis Pengawas Daerah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisi dan konstruksi data.

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.

konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theorema*” atau ajaran “*leerstelling*”.²⁰

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Menurut Abu Munawar, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal positif.

b. Ahli Waris

Pengertian tentang ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPer adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat.

Dalam hukum islam Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 7.

pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris.²¹ Dalam Permenkumham 25 tahun 2014 menjelaskan bahwa ahli waris Notaris yang selanjutnya disebut ahli waris adalah suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau garis kesamping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah yang nantinya mendapatkan hak serta kewajiban dari seseorang pewaris atau seseorang yang telah meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa harta peninggalan maupun piutang yang wajib dibayarkan oleh ahli waris tersebut.

c. Notaris

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta

²¹ Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam", (2008) 6:2, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, hlm. 3

otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²²

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih di segani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.²³

d. Pejabat Sementara Notaris

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pejabat Sementara Notaris diharapkan dapat menjadi jembatan terhadap segala kepengurusan akta yang telah ditinggalkan oleh Notaris yang telah meninggal dunia.

²² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.16.

²³ Tan Thong Kie, *Op Cit*, hlm. 444.

Pasal 40 ayat (1) Permenkumham nomor 25 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ahli waris atau karyawan Notaris mengusulkan Pejabat Sementara Notaris, MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan Notaris tersebut meninggal dunia.

e. Protokol Notaris

Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN-P menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol Notaris tersebut dijelaskan dalam Pasal 62 UUJN yang terdiri dari:

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar Akta atau repertorium;
3. Buku daftar Akta bawah tangan yang penandatanganananya dilakukan di hadapan ntaris atau Akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian ini melihat bagaimana aspek hukum positif serta melihat bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan baik dilapangan dan masyarakat. Data yang akan diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal praktek pengangkatan seorang pejabat sementara Notaris apabila seorang Notaris meninggal dunia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap sistematis tentang objek penelitian.²⁴ Dari penelitian ini penulis mendapatkan data tentang suatu keadaan secara lengkap dan menyeluruh mengenai bentuk pertanggungjawaban ahli waris terhadap protokol Notaris ke Pejabat Sementara Notaris.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit* hlm. 10.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam menyusun penelitian yuridis empiris ini berfokus kepada data primer. Data primer adalah yang didapatkan dan diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden baik itu Notaris, Karyawan Notaris, dan MPD.

b. Data Sekunder Yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh *legislatur*, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui analisa dari berbagai bahan-bahan hukum yang mengikat²⁵, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi,

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 31.

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan
Tata Kerja Majelis Pengawas.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature, jurnal, yang menunjang bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:²⁶

a. Studi Dokumen.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menesubjeklusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian.

Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin,

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 211.

jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.

Tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Ada dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

1. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi mengenai penelitian asli, mengenai aplikasi teori baru maupun penjelasan mengenai sebuah teori dalam semua disiplin ilmu.²⁷
2. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ataupun responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang

²⁷http://aniq-zuhri-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78083-LIBERTY-pengertian%20dokumen%20dan%20jenisnya.html. akses tanggal 23 April 2018.

terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.²⁸ Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan Para pihak yang menjadi Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Padang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan pustaka penulisan. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa data secara kualitatif. Terhadap data sekunder yang di dapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian.

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka pada tahap selanjutnya dilakukan proses pengeditan lapangan untuk dilakukan pengujian tentang kebenaran data yang diperoleh oleh penulis hingga pada akhirnya data tersebut dapat disusun dengan benar dan sesuai fungsinya, uraian dan kesimpulan dari penelitian

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, akses tanggal 23 Apri; 2018.

akan dihubungkan dengan teori-teori serta aturan formal yang telah ada sebelumnya.

